

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

1. Nama Organisasi
Perangkat Daerah : **DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi urusan Pemerintahan di Bidang Sosial meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Bidang pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

3. Fungsi :
 - a. Perumusan, Penetapan, Pengaturan dan Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa;
 - a. Penyelenggaraan fasilitasi, pengawasan supervisi dan evaluasi pelaksanaan tugas- tugas di bidang pemberdayaan di bidang pemerintahan desa;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi dinas; dan
 - c. Penyelenggaraan pembinaan di bidang pemberdayaan dan pemerintahan desa.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	LANDASAN KONSETUAL	TARGET	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Penataan Pemerintah Desa	Nilai Indeks Desa Membangun Provinsi	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan desa di Indonesia. Nilai IDM sendiri terdiri dari beberapa faktor yang mencakup kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.	0,6490	Poin	<p>Formulasi IDM mencakup beberapa komponen atau faktor yang dapat diukur dan dianalisis dalam menentukan tingkat pembangunan desa. Berikut adalah komponen-komponen dalam formulasi IDM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan: Komponen ini mencakup indikator-indikator seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat kematian bayi, tingkat kecelakaan, dan kesehatan lingkungan. 2. Pendidikan: Komponen ini mencakup indikator-indikator seperti akses terhadap pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi dalam pendidikan. 3. Ekonomi: Komponen ini mencakup indikator-indikator seperti kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. 4. Lingkungan: Komponen ini mencakup indikator-indikator seperti keberlanjutan lingkungan, akses terhadap sumber daya alam, dan tingkat polusi. <p>Dalam menghitung nilai IDM, setiap komponen tersebut diberi bobot atau nilai relatif, tergantung pada pentingnya setiap komponen dalam menentukan kualitas hidup masyarakat desa. Setelah itu, nilai-nilai dari setiap indikator dalam masing-masing komponen tersebut dihitung dan dikombinasikan menjadi sebuah nilai akhir, yaitu nilai IDM</p>	IDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	LANDASAN KONSETUAL	TARGET	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang masih tertinggal. Nilai-nilai yang menjadi acuan mencakup peningkatan akses dan pemerataan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan partisipasi masyarakat	79,13	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Desa Tertinggal}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$	IDM
3	Meningkatkan Kualitas kelembagaan Masyarakat di tingkat desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif adalah indikator yang mengukur jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dan beroperasi di suatu wilayah tertentu, seperti desa atau kecamatan. Konsep dasar dari indikator ini adalah bahwa keberadaan dan aktifitas lembaga kemasyarakatan sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Indikator ini mencakup semua jenis lembaga kemasyarakatan, seperti lembaga adat, lembaga koperasi, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan sebagainya.	70	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\text{Jumlah To Persentase Posyandu Aktif}} \times 100\%$ adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). tal Lembaga Kemasyarakatan) x 100%	Seluruh Bidang Lingkup Dinas PMD Sulbar
4	Meningkatnya Peran Posyandu dalam penanganan stunting	Persentase Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).	96,5	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Posyandu yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Posyandu}} \times 100\%$	Bidang PSD
5	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dinas PMD Sulbar	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) SKPD adalah indikator yang mengukur tingkat keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Indikator ini mencakup beberapa dimensi, seperti efektivitas birokrasi, kinerja pegawai, pengembangan kapasitas, manajemen	31,92	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi SKPD	Seluruh Bidang Lingkup Dinas PMD Sulbar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	LANDASAN KONSETUAL	TARGET	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
			keuangan, pengelolaan aset, dan pelayanan publik. melaksanakan Reformasi Birokrasi, dibagi dengan jumlah total SKPD yang ada di wilayah tersebut.				
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD Sulawesi Barat	Nilai SAKIP Dinas PMD Sulbar	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Landasan konseptual dari nilai SAKIP SKPD meliputi beberapa aspek yaitu Efektivitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabel	70,5		Nilai SAKIP SKPD	Seluruh Bidang Lingkup Dinas PMD Sulbar
7	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Publik Dinas PMD Sulbar	Indkes SPBE Dinas PMD Sulbar	Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) SKPD adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyediaan layanan kepada masyarakat	2,68		Nilai Indeks SPBE SKPD	Seluruh Bidang Lingkup Dinas PMD Sulbar

